

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan di MTs Amanatul Ummah memperlihatkan implementasi manajemen pendidikan Islam yang berjalan secara profesional, transparan, dan sistematis. Kebijakan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif semata, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata peserta didik melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan adaptif. Komunikasi berlapis melalui rapat koordinasi, apel pagi, hingga pemanfaatan media digital internal menjadi instrumen efektif dalam memastikan setiap kebijakan dipahami secara seragam tanpa menimbulkan multitafsir. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai manajerial modern, prinsip religius, sosial, serta pemanfaatan teknologi, MTs Amanatul Ummah berhasil menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga pada kemampuan menjalin sinergi dengan jejaring eksternal yang memperkuat daya dukung kelembagaan.

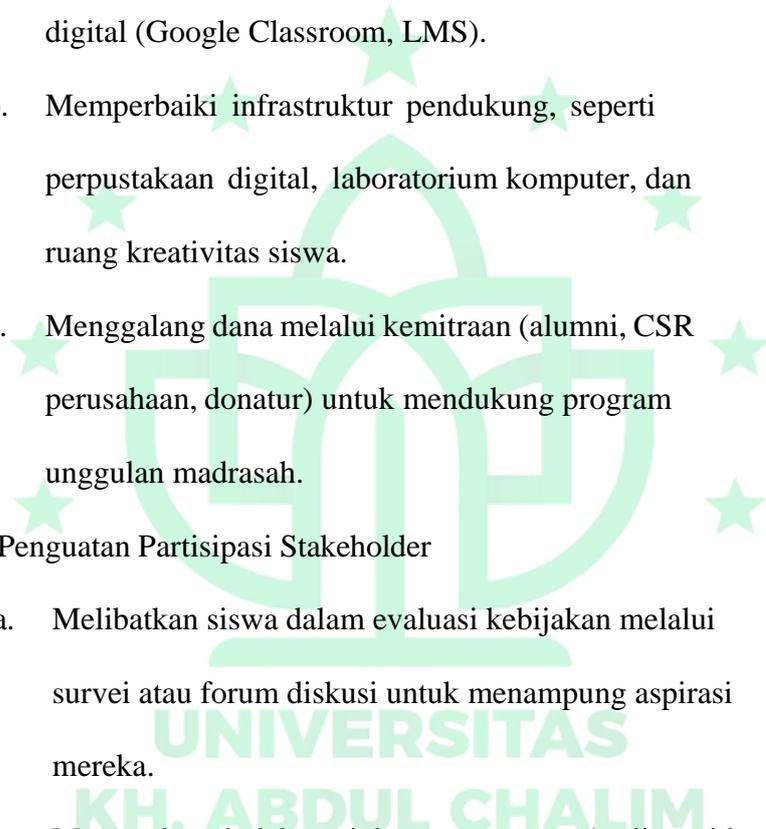
Adapun strategi pengawasan kepala madrasah memperlihatkan adanya transformasi mendasar dari sekadar mekanisme kontrol administratif menuju instrumen pengembangan mutu yang lebih integral dan holistik. Di sisi lain, pengawasan non-akademik melalui pembinaan ekstrakurikuler, forum OSIS, hingga kehidupan asrama memastikan bahwa aspek pembentukan karakter, spiritualitas, dan kedisiplinan siswa mendapat perhatian yang setara dengan capaian akademik. Dengan demikian,

pengawasan di MTs Amanatul Ummah tidak hanya berfungsi sebagai deteksi kesalahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun budaya mutu yang adaptif, reflektif, dan humanis. Kontribusi penelitian ini terletak pada model kebijakan dan pengawasan yang bersifat holistik, menyeimbangkan antara aspek akademik, spiritual, dan karakter siswa, sekaligus menjawab tantangan pendidikan Islam kontemporer yang menuntut efektivitas manajerial sekaligus humanisasi dalam tata kelola madrasah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti akan mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan
  - a. Meningkatkan pelatihan guru secara berkala, khususnya dalam pembelajaran inovatif (PBL, flipped classroom, digital tools).
  - b. Membentuk komunitas belajar (PLC/Professional Learning Community) untuk berbagi praktik terbaik antar-guru.
  - c. Menyediakan pendampingan (mentoring) bagi guru yang masih kesulitan beradaptasi dengan kebijakan baru.
2. Optimalisasi Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan
  - a. Membuat panduan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh warga madrasah (termasuk dalam bentuk infografis).
  - b. Mengadakan forum diskusi rutin (minimal bulanan) untuk mengevaluasi pemahaman dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

- 
- c. Memperkuat peran wakil kepala madrasah dan koordinator bidang dalam memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten.
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung
    - a. Mengembangkan fasilitas teknologi pembelajaran, seperti proyektor, akses internet stabil, dan platform digital (Google Classroom, LMS).
    - b. Memperbaiki infrastruktur pendukung, seperti perpustakaan digital, laboratorium komputer, dan ruang kreativitas siswa.
    - c. Menggalang dana melalui kemitraan (alumni, CSR perusahaan, donatur) untuk mendukung program unggulan madrasah.
  4. Penguatan Partisipasi Stakeholder
    - a. Melibatkan siswa dalam evaluasi kebijakan melalui survei atau forum diskusi untuk menampung aspirasi mereka.
    - b. Memperkuat kolaborasi dengan orang tua/wali murid, misalnya melalui komite madrasah yang lebih aktif dalam perencanaan program.
    - c. Membangun jaringan dengan madrasah/sekolah lain untuk berbagi pengalaman dan inovasi kebijakan.
  5. Pengembangan Sistem Monitoring & Evaluasi yang Lebih Efektif

- a. Membuat dashboard evaluasi kebijakan untuk memantau perkembangan program secara real-time.
- b. Menerapkan sistem reward & appreciation bagi guru/staf yang berkontribusi optimal dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Mengadakan audit internal tahunan untuk menilai efektivitas kebijakan dan menentukan langkah perbaikan

